

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurrahman, 1987, *Beberapa pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Melton Putra, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, KonPress, Jakarta.
- _____, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Cetakan Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Astawa, I Gede Pantja, 2008, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Atmadja, I Gede Dewa, 2012, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta.
- Busroh, Abu Daud, 1990, *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fajar Nur Dewata, Mukti, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harris, Syamsuddin, 2005, *Desentralisasi & Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIPI Press, Jakarta.
- Hidajat Imam, 2001, *Teori-Teori Politik*, SETARA Press, Malang.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Pres, Yogyakarta.
- _____, 2013, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangannya dan Problematikanya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- Indrati Soerapto, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Indrati S., Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Indroharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Iver, Mac, 1980, *Negara Modern*, Aksara Baru, Jakarta.
- J. Barents, 1960, *Ilmu Politika*, PT. Pembangunan Djakarta, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Kusnardi, Moh dan Hermaily Ibrahim, 1985, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan keenam, Pusat Studi Hukum tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lev, Daniel S., 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta

- Lotulung, Paulus Effendie, 1986, *Beberapa Sistem tentang kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Mahfud M.D., 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- _____, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 1995, *Sistem dan teknik Pembuatan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, LPPM, Bandung.
- _____, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marbun, B.N., 2005, *Otonomi Daerah 1945-2005; Proses & Realita*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Muslimin, Amrah, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mustafa, Bachsan, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kelima, Penerbit Alumni, Bandung.
- N. E. Algra, *et.al.*, 1983, *Kamus istilah Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Nasution, Adnan Buyung, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-legal Atas Konstituante 1956-1959*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

- Nasution, Bahder Johan, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, 2007, *Metodologi penelitian*, PT Bumi aksara, Jakarta.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum (cetakan kedua belas)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riyanto, Astim, 2006, *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, YAPEMDO, Bandung.
- Ridwan H.R., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Rosodjatmiko, 1982, *Kumpulan karangan DR. Ateng Syafrudin tentang penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dan pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung.
- Sanit, Arbi, 1998, *Reformasi Politik*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta.
- Santoso, Agus, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Simarmata, Rikardo, Stephanus Masiun, 2002, *Otonomi Daerah; Kecenderungan Karakter Perda dan Tekanan Baru Bagi Lingkungan dan Masyarakat Adat*, HuMA, Jakarta.
- Siragih, Bintang Regen, 2006, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung.
- Sirajuddin, et.al., 2015, *Legislative Drafting; Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang.
- Suharizal, 2012, *Demokrasi Pemilu pada Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, UNPAD Press, Bandung.
- Sunarno, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumarjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 2014, *Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasanrana Indonesia, Jakarta.

- Soebechi, Imam, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soehino, 1980, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1998, *Ilmu negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soejito, Irawan, 1983, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dalam Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1989, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1997, *Hak Uji Material Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Syafrudin, Ateng, 1981, *Hubungan Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Tarsito, Bandung
- Syaukani, *et.al.*, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syaukani, Imam, A. Ahsin Thohari, 2015, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Tauda, Gunawan A., 2012, *Komisi Negara Independen; Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta.
- Utrecht, E., 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keempat, Pustaka Tirta Mas, Surabaya
- Wahjono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Waridah, E., 2009, *EYD saku+*, Kawah Media, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Diluar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Lembaga-Lembaga Tinggi Negara;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; Serta perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1957 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1143;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778;

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316
- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4948;
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1843;

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960 tentang Wakil Kepala Daerah Tingkat I; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1932;

Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Sekretariat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2042;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

C. Putusan pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV/2016 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

D. Jurnal dan Majalah

Enny Nurbaningsih, “Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah dalam era Otonomi Luas”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, Februari 2011.

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, January-Maret 2014.

Fatkurohman dan Miftachus Sjuhad, “Efektivitas Penyelesaian Pembatalan Peraturan Daerah Melalui Metode Keberatan di Mahkamah Agung oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 1 No. 3 September- Desember 2012.

Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum”, *Refleksi Hukum*, Vol. 8 No. 1, April 2014.

Herman, “Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara”, *Jurnal Komunikasi Hukum Volume 1, Nomor 1*, Februari 2015.

Leo Agustino, “Pembatalan 3.143 Peraturan daerah: Satu Analisis Singkat”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov Vol.3 No.1*, April 2017.

Miftakhul Huda, “contrarius actus”, *Majalah Konstitusi*, Nomor 34, Edisi November 2009.

- Ni'matul Huda, "Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. Edisi Khusus, Oktober 2009.
- Retno Saraswati, "Implikasi Yuridis Terhadap Pengawasan Perda Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 3, Juli 2012.
- Ridwan H.R., "Dimensi Hukum Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 18, Oktober 2011.

E. Laporan dan Penelitian

- Asnawi Arbain, 2006, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bhenyamin Hoessein, 1993, Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Boedi Rheza, *et.al.*, 2014, "Evaluasi Perda Pungutan di Era UU No. 28 Tahun 2009", *Laporan Penelitian*, Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta
- DPR RI, 2000, "Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah", *Laporan*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
- DPR RI, 2004, "Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah", *Laporan*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
- DPR RI, 2014, "Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah", *Laporan*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
- Edy Priyono, "Menangani Perda Bermasalah: Seriuskah Pemerintah?", *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Nasional Refleksi 3 Tahun Otonomi Daerah di Indonesia, 27 Januari 2004, Jakarta.
- Enny Nurbaningsih, *et.al.*, 2016, "Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Naskah Akademik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2011, "Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah", *Naskah Akademik*, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016, “Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, *Laporan Tahunan*”, Komnas HAM, Jakarta.

M. N. Solikhin, *et.al.*, 2011, “Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda Oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung”, *Laporan Penelitian*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Muhadi, 2009, Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan Pusat Dalam Rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Singgih Wiranto, 2004, Pengawasan Represif Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

F. Website

Aubrey Kandelila Fanani, “Kemendagri: Perda Diskriminatif Perlu Diluruskan”, <https://www.antaranews.com/berita/567922/kemendagri-perda-diskriminatif-perlu-diluruskan>, diakses pada 9 Januari 2018, Pukul 10.26 WIB.

Bayu Prasetyo, “Presiden Jokowi: Cabut 3.000 Perda Bermasalah”, <https://www.antaranews.com/berita/542786/presiden-jokowi-cabut-3000-perda-bermasalah>, diakses pada 4 Januari 2018, pukul 01.30 WIB.

Dimas Jarot Bayu, “Komnas Perempuan Sesalkan Kemendagri yang Tak Batalkan Perda Diskriminatif”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/18/21235021/komnas.perempuan.sesalkan.kemendagri.yang.tak.batalkan.perda.diskriminatif>, diakses pada 7 Januari 2018, Pukul 20.02 WIB.

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Di Indonesia Sampai Dengan Tahun 2014”, http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf, diakses pada 3 Maret 2018, Pukul 20.02 WIB

Fajrimei A Gofar, “Perda Bermasalah atau perda Dipermasalahan?”, <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F8515/Perda%20Bermasalah%20atau%20Perda%20Dipermasalahan.htm>, diakses pada tanggal 27 Desember 2017, pukul 21.07 WIB.

- Handra, “715 Perda Penghambat Investasi dibatalkan”, <https://www.antaranews.com/berita/172646/715-perda-penghambat-investasi-dibatalkan>, diakses pada 3 Januari 2018, Pukul 19.02 WIB.
- Hanna Azarya Samosir, “Sebanyak 365 Perda Mendiskriminasi Perempuan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141112144737-20-11035/sebanyak-365-perda-mendiskriminasi-perempuan>, diakses pada 7 Januari 2018, Pukul 22.13 WIB.
- Hukum Online, “3.143 Perda Bermasalah Dibatalkan, Ini Penjelasan Presiden”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575ea1862a089/3143-perda-bermasalah-dibatalkan--ini-penjelasan->, diakses pada tanggal 5 Januari 2018, pukul 17.33 WIB.
- Humas Sekretariat Kabinet RI, “Beri Waktu Hingga Juli, Presiden Jokowi Minta Mendagri Hapus 3000 Perda Bermasalah”, <http://setkab.go.id/beri-waktu-hingga-juli-presiden-jokowi-minta-mendagri-hapus-3000-perda-bermasalah/>, diakses pada 5 Januari 2018, pukul 21.37 WIB
- Icha Rastika, “Sejak November 2014 hingga Mei 2015, Mendagri Batalkan 139 Perda”, <https://nasional.kompas.com/read/2015/07/22/17054251/Sejak.November.2014.hingga.Mei.2015.Mendagri.Batalkan.139.Perda>, diakses pada 8 Januari 2018, Pukul 19.21 WIB.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Presiden Jokowi: Cabut 3.000 Perda Bermasalah”, <http://www.kemendagri.go.id/news/2016/01/30/presiden-jokowi-cabut-3000-perda-bermasalah>, diakses pada 5 Januari 2018, pukul 01.12 WIB
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Presiden Umumkan 3.143 Perda Bermasalah”, <http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/13/presiden-umumkan-pembatalan-3143-perda-bermasalah>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018, pukul 16.43 WIB.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Batal perda 21 Juni 2016”, http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf, diakses pada 6 Januari 2018, pukul 10.21 WIB.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, <http://kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada 28 Desember 2017, pukul 15.22 WIB.
- Kementerian PPN/BAPPENAS, “PAKET KEBIJAKAN XII: Pemerintah Pangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia”, <http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-xii->

[pemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-berusaha-di-indonesia/](#), diakses pada 6 Januari 2018, pukul 18.21 WIB.

Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, “*KPPOD Temukan 262 Perda Bermasalah*”, <https://www.kppod.org/berita/view?id=503>, diakses pada 28 Desember 2017, Pukul 19.22 WIB.

Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, “*Statistik Data Perkara Mahkamah Agung*”, <http://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/>, diakses pada 18 Februari 2018, Pukul 19.25 WIB.

Maikel Jefriando, “*Presiden Perintahkan Mendagri hapus 3.000 Perda Bermasalah*”, <https://news.detik.com/berita/3175657/presiden-jokowi-perintahkan-mendagri-hapus-3000-perda-bermasalah>, diakses pada 5 Januari 2018, pukul 02.21 WIB.

Mohamad Agus Yozami, “*Komnas Perempuan: 421 Perda Rugikan Perempuan*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5805ba0803953/komnas-perempuan--421-perda-rugikan-perempuan>, diakses pada 7 Januari 2018, Pukul 22.42 WIB.

Nabilla Tashandra, “*Komnas HAM Temukan 20 Perda Diskriminatif di 6 Daerah di Jabar*”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/05/13153811/Komnas.HAM.Temukan.20.Perda.Diskriminatif.di.6.Daerah.di.Jabar>, diakses pada 8 Januari 2018, Pukul 18.37 WIB.

Nur Avianni, “*3200 Perda di Indonesia Bertentangan dengan HAM*”, <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/07/158135/3/1/3.200-Perda-di-Indonesia-Bertentangan-dengan-HAM>, diakses pada 8 Januari 2018, Pukul 02.12 WIB.

Rudy Polycarpus, “*3000 Perda Bermasalah Akan Dihapus*”, <http://mediaindonesia.com/news/read/30240/3000-perda-bermasalah-akan-dihapus/2016-02-23>, diakses pada 8 Januari 2018, Pukul 23.09 WIB.

Setara Institute, “*Pembatalan Perda Bermasalah: Adakah Perda Intoleran Dan Diskriminatif Juga Dibatalkan?*”, <http://setara-institute.org/pembatalan-perda-bermasalah-adakah-perda-intoleran-dan-diskriminatif-juga-dibatalkan/>, diakses pada 8 Januari 2018, Pukul 20.32 WIB.

Tempo, “*3.000 Perda Bermasalah, Jokowi: Enggak Usah Dikaji, Cabut Saja*”, <https://nasional.tempo.co/read/740767/3-000-perda-bermasalah-jokowi-enggak-usah-dikaji-cabut-saja>, diakses pada 5 Januari 2018, pukul 01.55 WIB.

- Tempo, “*Komisi Nasional Perempuan: 154 Peraturan Daerah Diskriminatif*”, <https://nasional.tempo.co/read/166220/komisi-nasional-perempuan-154-peraturan-daerah-diskriminatif>, diakses pada 7 Januari 2018, Pukul 20.22 WIB.
- Yance Arizona, “*Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu Tinjauan Normatif*”, <https://yancearizona.files.wordpress.com/2008/07/disparitas-pengujian-peraturan-daerah.pdf>, diakses pada 16 Februari 2018, Pukul 13.16 WIB.